



KEBIJAKAN, KESENJANGAN DAN TANTANGAN TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DI SULAWESI SELATAN

Yasysyar Hidayat¹, Ansar²

^{1,2} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: yasysyarh@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i2.2093>

Sections Info

Article history:

Submitted: 27 January 2026

Final Revised: 11 February 2026

Accepted: 16 March 2026

Published: 30 April 2026

Keywords:

Digital Transformation

Educator Development

Education Policy

Education Gap

Education Challenges



ABSTRACT

This literature review on digital transformation policies, gaps, and challenges in educator development in South Sulawesi aims to analyze policies, gaps, and challenges related to digital transformation. This study uses a systematic literature review approach by examining various sources published between 2021 and 2026. The analysis was conducted thematically, covering four main dimensions policy gaps, infrastructure and competency, organizational culture challenges, and the implications of digital transformation for educator professional development. The study results show that South Sulawesi has launched several innovative programs such as Smart Schools, Collaborative Digital Classes, digitalization of governance through Electronic Signatures, and Smart School Learning Communities. However, the implementation of these programs still faces significant infrastructure gaps, particularly in remote, island, and mountainous areas, where internet penetration in Sulawesi has only reached 68.35% the lowest in Indonesia. Cultural challenges such as resistance to change, low teacher digital literacy, and an organizational culture that does not support innovation also slow down the implementation of digital transformation.

ABSTRAK

Kajian literatur kebijakan, kesenjangan dan tantangan terhadap transformasi digital dalam pengembangan pendidik di sulawesi selatan, bertujuan menganalisis kebijakan, kesenjangan, dan tantangan transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dengan menelaah berbagai sumber yang diterbitkan dalam kurun waktu 2021–2026. Analisis dilakukan secara tematik meliputi empat dimensi utama yakni kebijakan, kesenjangan infrastruktur dan kompetensi, tantangan budaya organisasi, serta implikasi transformasi digital bagi pengembangan profesional pendidik. Hasil kajian menunjukkan Sulawesi Selatan telah meluncurkan sejumlah program inovatif seperti Smart School, Collaborative Digital Class, digitalisasi tata kelola melalui Tanda Tangan Elektronik, dan Komunitas Belajar Smart School. Namun, implementasi program-program tersebut masih berhadapan dengan kesenjangan infrastruktur yang signifikan, terutama di daerah terpencil, kepulauan, dan pegunungan, di mana penetrasi internet di Sulawesi hanya mencapai 68,35% terendah di seluruh Indonesia. Tantangan kultural berupa resistensi terhadap perubahan, literasi digital guru yang rendah, serta budaya organisasi yang belum mendukung inovasi turut memperlambat implementasi transformasi digital.

Kata kunci: Transformasi digital, Pengembangan pendidik, Kebijakan pendidikan, Kesenjangan pendidikan, Tantangan pendidikan

PENDAHULUAN

Transformasi digital di sektor pendidikan telah berkembang menjadi tuntutan sistemik yang tidak dapat diabaikan oleh negara manapun, termasuk Negara Indonesia. Perubahan ini mencakup cara guru mengajar, cara peserta didik belajar, serta cara institusi pendidikan dikelola melalui pemanfaatan teknologi digital secara terstruktur dan berkelanjutan. Hasmirati, (2026) menegaskan bahwa transformasi digital dalam manajemen pendidikan merupakan perubahan organisasi yang komprehensif yang melibatkan kepemimpinan, budaya kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dan pengambilan keputusan berbasis data, bukan sekadar pengadaan perangkat teknologi. Kajian sistematis yang dilakukan Septio dkk. (2025) menemukan bahwa transformasi digital merupakan proses multifaset yang melampaui adopsi teknologi semata, dan menuntut perubahan fundamental dalam pedagogi, budaya sekolah, serta kompetensi sumber daya manusia.

Di tingkat nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai regulasi dan program yang mendorong transformasi digital dalam pendidikan. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan secara eksplisit mengamanatkan percepatan digitalisasi pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 telah mendistribusikan 172.550 perangkat *Interactive Flat Panel* (IFP) kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dengan target distribusi lengkap pada Desember 2025. Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang kini bertransformasi menjadi Ruang GTK, telah diposisikan sebagai instrumen utama pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja guru secara digital. Helmawati, (2025) dalam kajiannya tentang perubahan paradigma guru melalui Platform Merdeka Mengajar menemukan bahwa platform ini mendorong guru untuk beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, meningkatkan kreativitas, dan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Implementasi kebijakan transformasi digital ini menghadapi tantangan nyata di level daerah, khususnya terkait kesenjangan infrastruktur, kompetensi, dan kesiapan budaya organisasi. Penelitian oleh Antukai dkk. (2025) tentang transformasi pendidikan berkelanjutan di Indonesia bagian timur menemukan bahwa akselerasi transformasi digital membutuhkan kepemimpinan digital yang kuat dari kepala sekolah untuk mendukung pengembangan kompetensi digital guru, terutama di sekolah-sekolah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan rendahnya literasi digital pendidik. Kondisi ini sangat relevan bagi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik wilayah sangat beragam yang meliputi daerah pesisir, kepulauan, pegunungan, dan perkotaan, sehingga menciptakan disparitas kapasitas transformasi digital yang cukup lebar antarsatuan pendidikan. Sumual dkk. (2025) menegaskan bahwa infrastruktur TIK yang memadai merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan transformasi digital di satuan pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi kendala keterbatasan pendanaan, kesenjangan akses internet, dan rendahnya literasi digital tenaga pendidik.

Di Sulawesi Selatan sendiri, Pemerintah Provinsi telah berupaya mempercepat transformasi digital melalui berbagai inisiatif strategis. Program *Smart School* yang diinisiasi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada 2022 merupakan sistem pembelajaran hybrid pertama yang diluncurkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yang bertujuan menyamakan standar kualitas pembelajaran bagi seluruh siswa SMA Negeri se-Sulawesi Selatan. Program ini kemudian dikembangkan dengan peluncuran Komunitas Belajar *Smart School* pada platform Ruang GTK Kemdikbudristek pada Juni 2025, sebagai wadah

kolaborasi antar guru dalam berbagi praktik baik dan memperkuat kompetensi digital. Di sisi administratif, digitalisasi tata kelola melalui penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi 518 kepala sekolah SMA/SMK Negeri se-Sulsel pada September 2024 menandai langkah konkret percepatan transformasi digital dalam manajemen pendidikan daerah.

Meskipun berbagai program tersebut telah diluncurkan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kesenjangan dan tantangan implementasi transformasi digital bagi pendidik di Sulawesi Selatan masih cukup dalam. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII (2024) mencatat bahwa penetrasi internet di Pulau Sulawesi merupakan yang terendah di seluruh Indonesia, yakni hanya 68,35%. Data BPS menunjukkan disparitas akses internet yang tajam di provinsi Sulawesi Selatan, di mana Kota Makassar mencapai 79,66% sementara Tana Toraja hanya 46,72%, dan terdapat *blank spot* di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Toraja, serta Kepulauan Selayar. Kesenjangan infrastruktur ini berdampak langsung pada kemampuan satuan pendidikan dan pendidik untuk mengakses dan memanfaatkan platform digital secara optimal dalam proses pembelajaran maupun pengembangan profesional.

Penelitian Siska, (2023) di SMA Negeri 1 Luwu Timur mengungkapkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka yang didukung teknologi digital masih menghadapi kendala infrastruktur dan kompetensi guru, meskipun secara kebijakan dan program sekolah sudah diarahkan ke pembelajaran berbasis platform digital, meskipun sebagian besar guru sudah memiliki perangkat dan akses internet yang relatif stabil, masih terdapat kebutuhan signifikan akan pelatihan pemanfaatan teknologi, desain pembelajaran digital yang menarik, serta sistem pendukung teknis yang memadai. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital di Sulawesi Selatan bukan semata persoalan ketersediaan perangkat, melainkan juga menyangkut dimensi kompetensi, dukungan kelembagaan, dan budaya kerja pendidik.

Berbagai kajian literatur juga menegaskan bahwa budaya organisasi merupakan salah satu determinan utama keberhasilan transformasi digital di sekolah. Septio dkk. (2025) dalam tinjauan literatur sistematisnya menyimpulkan bahwa hambatan utama transformasi digital, khususnya di Indonesia, adalah kesenjangan digital yang tajam dalam hal infrastruktur dan kompetensi, serta hambatan internal seperti resistensi guru terhadap perubahan. Triyunita dkk. (2025) menemukan bahwa transformasi digital berdampak signifikan terhadap kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian guru; namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa *digital divide* dan keterbatasan akses teknologi yang memerlukan pelatihan berkelanjutan, penguatan literasi digital, dan kebijakan pendidikan yang mendukung pemanfaatan teknologi optimal.

Kajian ini memiliki urgensi yang kuat, dari sisi kebijakan Negara Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengamanatkan percepatan digitalisasi pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan, namun implementasinya di daerah, khususnya Sulawesi Selatan yang masih terfragmentasi dan belum komprehensif. Selanjutnya, dari sisi data kesenjangan. Survei APJII (2024) mencatat bahwa penetrasi internet di Pulau Sulawesi hanya mencapai 68,35%, merupakan yang terendah di seluruh Indonesia, jauh di bawah rata-rata nasional 79,5%. Nashrullah & Rahman, (2024) dalam analisis kebijakan digitalisasi pendidikan Indonesia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan kesenjangan akses justru berpotensi memperlebar disparitas kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Kemudian, dari sisi kompetensi pendidik. Judijanto, (2024) menemukan korelasi positif yang signifikan antara tingkat literasi digital guru dan kualitas pembelajaran, sehingga rendahnya literasi digital guru di wilayah Sulawesi Selatan yang berdampak pada mutu pendidikan yang diterima peserta didik.

No	Dimensi Urgensi	Indikator/Data	Sumber
1	Kebijakan Nasional	Inpres No. 7/2025 amanatkan percepatan digitalisasi pembelajaran seluruh jenjang	Presiden RI (2025)
2	Penetrasi Internet Terendah	Sulawesi: 68,35% (Terendah) vs. Jawa: 83,64% (Tertinggi)	APJII (2024)
3	Disparitas Intraprovinsi	Makassar: 79,66% vs. Tana Toraja: 46,72%; masih ada blank spot di Luwu & Selayar	BPS (2024)
4	Literasi Digital Guru Rendah	Korelasi +52% antara literasi digital guru dan kualitas pembelajaran	Judijanto (2024)
5	Resistensi Perubahan	Hambatan budaya > hambatan teknis dalam transformasi digital pendidikan di Indonesia	Septio dkk (2025)
6	Kesenjangan Kompetensi	Guru senior kesulitan menggunakan platform digital; butuh pelatihan berkelanjutan	Marnoko (2025)
7	Efisiensi Tata Kelola	TTE: waktu penandatanganan 4 hari → 40 menit bagi 518 Kepsek SMA/SMK Sulsel	Pemprov Sulsel (2024)

Tabel 1. Indikator Urgensi Transformasi Digital Pendidikan di Sulawesi Selatan

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini yang secara terfokus memetakan kebijakan, kesenjangan, tantangan, dan implikasi transformasi digital dalam pengembangan pendidik di Sulawesi Selatan masih sangat terbatas. Penelitian yang ada cenderung membahas transformasi digital pendidikan pada level nasional atau di konteks daerah lain di Indonesia. Kajian sistematis ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan menganalisis kebijakan daerah, kesenjangan infrastruktur dan kompetensi, tantangan implementasi, proses pelaksanaan, serta implikasi transformasi digital bagi pendidik di Sulawesi Selatan secara utuh dan komprehensif. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk kebijakan transformasi digital untuk pengembangan pendidik di Sulawesi Selatan pada level nasional dan daerah, memetakan dan menganalisis kesenjangan transformasi digital dalam aspek kebijakan, infrastruktur, kompetensi, dan budaya organisasi, mengidentifikasi tantangan utama implementasi transformasi digital bagi pendidik di Sulawesi Selatan, mendeskripsikan proses pelaksanaan transformasi digital dalam pengembangan pendidik di Sulawesi Selatan dari aspek peningkatan kompetensi, dukungan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi dan menganalisis implikasi transformasi digital dalam pengembangan pendidik di Sulawesi Selatan untuk kebijakan dan praktik di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*) dengan analisis tematik sebagai metode utama pengumpulan dan pengolahan data. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang diterbitkan dalam periode 2021-2026, dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah, laporan resmi instansi pendidikan, tesis dan disertasi dari repositori universitas, serta portal berita resmi pemerintah daerah Sulawesi Selatan, yang seluruhnya relevan dengan topik transformasi digital, pengembangan pendidik, dan konteks pendidikan di Sulawesi Selatan,

proses seleksi literatur dilakukan melalui penelusuran basis data Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan repositori kelembagaan dengan menggunakan kata kunci yang spesifik seperti transformasi digital pendidikan Sulawesi Selatan, kesenjangan digital infrastruktur pendidikan dan kebijakan digital pendidik, sehingga diperoleh literatur yang kredibel, terbaru, dan dapat diakses secara penuh untuk mendukung analisis yang komprehensif dan berbasis bukti.



Gambar 1. Tahapan *Systematic Literature Review* (SLR) dalam kajian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Transformasi Digital dalam Pengembangan Pendidik di Sulawesi Selatan

1. Kebijakan Nasional sebagai Payung Hukum

Transformasi digital pendidikan di Indonesia memiliki landasan kebijakan yang semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Nashrullah & Rahman, (2024) dalam Analisis kebijakan menggunakan *Policy Analysis Triangle Model* menemukan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia lahir dari tuntutan global dan domestik untuk merespons kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan konten kebijakan mencakup berbagai inisiatif seperti platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, SIPLah, ARKAS, dan bantuan laptop. Proses pembuatan kebijakan tersebut melibatkan riset ekstensif dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meski masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan payung hukum terbaru dan paling komprehensif yang secara eksplisit mengarahkan percepatan digitalisasi pembelajaran. Instruksi ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi digital, dengan pembiayaan dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. Helmawati, (2025) menemukan bahwa Platform Merdeka Mengajar (PMM)/Ruang GTK tidak hanya memfasilitasi guru dalam mengelola kinerja, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui pendekatan pembelajaran berbasis teknologi yang lebih mandiri, inovatif, dan responsif. Sulispala dkk. (2025) dalam penelitiannya di SDN 007 Simandolak menemukan bahwa guru memiliki kesadaran tinggi

tentang pentingnya teknologi dalam pembelajaran, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses perangkat digital, koneksi internet yang tidak stabil, dan kurangnya pelatihan teknologi yang memadai, terutama bagi guru senior. Sejalan dengan hal tersebut, direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Gogot Suharwoto menegaskan bahwa "digitalisasi pembelajaran menjadi upaya percepatan agar anak-anak Indonesia bisa mengejar ketertinggalan sekaligus terbiasa dengan keterampilan abad 21." Implementasi Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025, dengan distribusi 172.550 perangkat *Interactive Flat Panel* kepada sekolah-sekolah di seluruh 38 provinsi.

Pada level manajemen dan pengembangan kompetensi guru, Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang kini bertransformasi menjadi platform Ruang GTK merupakan instrumen kebijakan utama yang mengintegrasikan pengelolaan kinerja guru dengan pengembangan profesional berbasis digital. Ro'fah dkk. (2024) dalam tinjauan literatur sistematisnya terhadap 13 artikel relevan menemukan bahwa PMM memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kompetensi guru, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap fitur-fitur yang tersedia, keterbatasan akses teknologi, dan waktu yang terbatas untuk belajar. Ruang GTK dirancang sebagai ruang belajar, inspirasi, dan kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah yang bersifat inklusif, terintegrasi, dan mudah digunakan. Studi tentang implementasi PMM untuk pengelolaan kinerja guru menunjukkan bahwa platform ini memberikan dampak positif terhadap kinerja guru melalui pemantauan *real-time* dan umpan balik yang lebih cepat, meskipun adaptasi teknologi masih menjadi tantangan bagi guru yang kurang familiar dengan aplikasi digital.

2. Kebijakan Daerah Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program transformasi digital yang inovatif dan spesifik. Program *Smart School* dengan konsep "*Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel*" merupakan inisiatif strategis terpenting yang dicanangkan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sejak tahun ajaran 2022/2023. Program ini menghadirkan sistem pembelajaran hybrid pertama yang diluncurkan pemerintah provinsi di Indonesia, menggabungkan pembelajaran online dan offline secara bersamaan, dengan menghadirkan 70 guru terbaik yang dipilih melalui seleksi ketat untuk memberikan pembelajaran berkualitas bagi seluruh siswa SMA Negeri se-Sulawesi Selatan secara seragam. Handayani Mardin dkk. (2024) dalam studinya terhadap implementasi program *Smart School* menemukan bahwa program ini menunjukkan keunggulan relatif dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, efisiensi administrasi sekolah, dan pengembangan keterampilan digital siswa.

Pengembangan program *Smart School* terus berlanjut dengan peluncuran Komunitas Belajar *Smart School* pada platform Ruang GTK Kemdikbudristek pada Juni 2025 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Komunitas belajar ini diintegrasikan dengan studio pembelajaran e-Andalan *Smart School* sebagai pusat produksi konten pembelajaran digital di Sulawesi Selatan, sehingga guru-guru yang tergabung dapat mengakses, memanfaatkan, dan ikut serta dalam pengembangan konten pembelajaran digital secara aktif. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Sulsel, Anshar Syukur, menyatakan bahwa komunitas ini menjadi "penghubung antara kebijakan dan praktik nyata di lapangan." Pada kegiatan yang sama, Dinas Pendidikan Sulsel juga berkolaborasi dengan *ASEAN Foundation*, *Google.org*, dan *Kaizen Collaborative Impact* dalam kegiatan *Hour of Code* yang melibatkan pendidik dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari kampanye literasi digital di 10 negara

ASEAN.

Program *Collaborative Digital Class* (CDC) yang diluncurkan Dinas Pendidikan Sulsel pada Maret 2025 merupakan inisiatif strategis berikutnya untuk membangun ekosistem pembelajaran digital berbasis pentahelix. Program yang diinisiasi melalui UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PTIKP) ini melibatkan pemerintah, sekolah, industri (Gojek, Penerbit Erlangga, PT Rachita Group), akademisi, komunitas, dan media sebagai mitra implementasi. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ibu Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa "transformasi digital dalam pendidikan merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul dan siap bersaing di era global." Program CDC memberikan pelatihan bagi 3.447 siswa dalam literasi digital, 35 siswa dalam keamanan siber dasar, serta 35 siswa dalam pelatihan robotik, sementara bagi tenaga pengajar diberikan pelatihan pemanfaatan AI kepada 730 orang, visualisasi data kepada 30 peserta, dan produksi video kepada 30 peserta.

Di bidang tata kelola administratif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui sinergi Dinas Kominfo-SP dan Dinas Pendidikan pada September 2024 menerbitkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi 518 kepala sekolah SMA/SMK Negeri se-Sulawesi Selatan. Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa dengan TTE, proses penandatanganan dokumen yang semula memakan waktu hingga empat hari dapat dipersingkat menjadi 40 menit saja. Digitalisasi persuratan ini menjadi contoh nyata transformasi digital dalam dimensi administratif pendidikan yang berdampak langsung pada efisiensi kerja kepala sekolah sebagai pendidik dan manajer satuan pendidikan. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sulawesi Selatan turut memperkuat ekosistem ini melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengembangan Situs Mandiri Google Site dan Multimedia bagi 240 GTK se-Sulsel pada Oktober hingga November 2025.

3. Matriks Kebijakan Transformasi Digital Pendidikan Sulawesi Selatan

No	Kebijakan / Program	Level	Sasaran Utama	Tahun
1	Inpres No. 7 Tahun 2025 tentang Digitalisasi Pembelajaran	Nasional	Seluruh sekolah	2025
2	Program Digitalisasi Pembelajaran (IFP/Smartboard)	Nasional	Guru dan siswa	2025
3	Platform Ruang GTK / PMM (Manajemen Kinerja)	Nasional	Guru & Kepsek	2024-2025
4	Smart School "Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel"	Provinsi	Siswa & Guru SMA	2022-2025
5	Collaborative Digital Class (CDC)	Provinsi	Siswa & Guru SMA	2025
6	Komunitas Belajar Smart School (Ruang GTK)	Provinsi	Guru semua jenjang	2025
7	TTE 518 Kepala Sekolah SMA/SMK	Provinsi	Kepala Sekolah	2024
8	Bimtek Situs Mandiri & Multimedia (BBGTK)	Provinsi	GTK se-Sulsel	2025

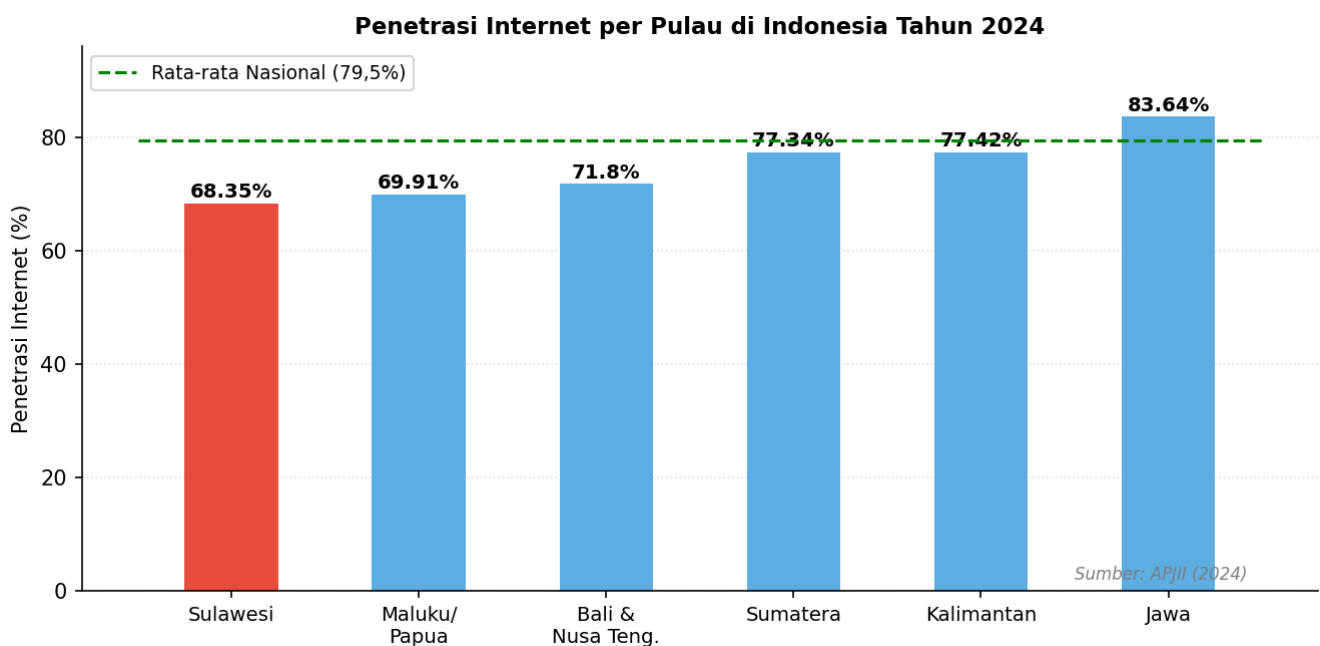
9	Hour of Code x ASEAN Foundation	Provinsi atau Internasional	Pendidik Sulsel	2025
---	---------------------------------	-----------------------------	-----------------	------

Tabel 2. Matriks Kebijakan Transformasi Digital Pendidikan Sulawesi Selatan

B. Kesenjangan Transformasi Digital dalam Pengembangan Pendidik di Sulawesi Selatan

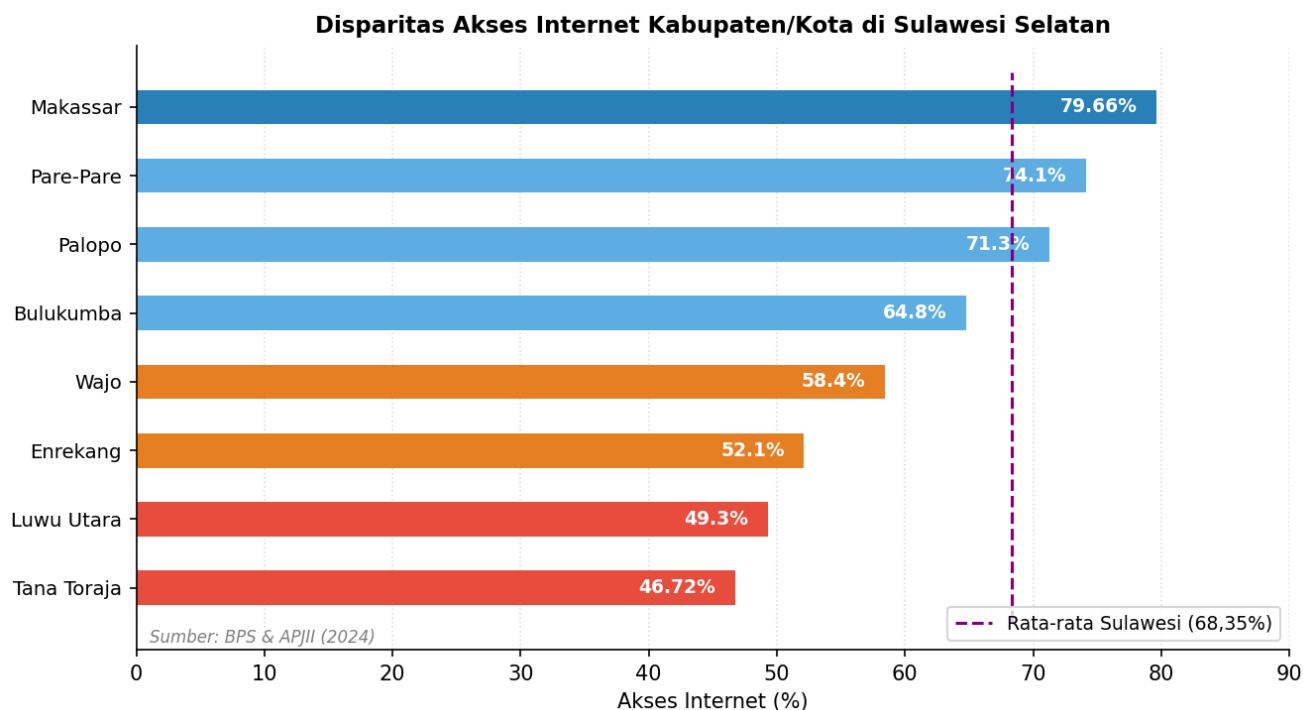
1. Kesenjangan Infrastruktur

Kesenjangan infrastruktur merupakan dimensi kesenjangan yang paling kasat mata dan berdampak langsung pada kapasitas pendidik untuk berpartisipasi dalam transformasi digital. Survei APJII (2024) mencatat bahwa penetrasi internet di Pulau Sulawesi hanya mencapai 68,35%, merupakan yang terendah di seluruh Indonesia, jauh di bawah Pulau Jawa yang mencapai 83,64%. Data ini mengonfirmasi bahwa Sulawesi Selatan menghadapi tantangan struktural yang serius dalam pembangunan ekosistem digital pendidikan yang merata. Sumual dkk. (2025) menegaskan bahwa infrastruktur TIK yang tidak memadai menjadi hambatan utama transformasi digital di satuan pendidikan, mencakup keterbatasan pendanaan, kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital tenaga pendidik, serta lemahnya kebijakan pemeliharaan dan keamanan data.



Gambar 2. Penetrasi Internet per Pulau di Indonesia Tahun 2024

Disparitas infrastruktur bahkan terjadi dalam skala intraprovinci yang sangat mencolok. Data BPS tentang Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa akses internet di Kota Makassar mencapai 79,66%, sementara Tana Toraja hanya 46,72%, dan masih terdapat tiga area *blank spot* di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Toraja, serta tantangan konektivitas di Kepulauan Selayar akibat kondisi geografis kepulauan dan ketidakstabilan listrik. Laporan kondisi pendidikan di daerah pelosok Sulawesi Selatan menggambarkan bahwa banyak sekolah di pelosok masih terisolasi secara digital, di mana akses internet yang tidak stabil dan minimnya perangkat komputer membuat siswa dan pendidik di daerah tersebut tertinggal dalam pembelajaran berbasis teknologi.



Gambar 3. Disparitas Akses Internet Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (2024)

Perkembangan positif menunjukkan bahwa dari 3.051 desa/kelurahan di Sulawesi Selatan, jumlah yang memiliki akses internet meningkat signifikan dari 321 desa pada 2014 menjadi 1.629 desa pada 2021. Namun demikian, ini berarti masih terdapat lebih dari 1.101 desa/kelurahan yang belum memiliki akses internet, yang sebagian besar merupakan lokasi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Kesenjangan infrastruktur listrik yang tidak stabil di daerah-daerah tersebut turut menjadi hambatan tambahan bagi upaya digitalisasi pendidikan.

2. Kesenjangan Kompetensi Digital Pendidik

Kesenjangan kompetensi digital pendidik merupakan tantangan multidimensi yang mencakup aspek teknis, pedagogis, dan motivasi. Marnoko, (2025) dalam kajian literatur sistematis terhadap 23 artikel nasional dan internasional menemukan bahwa tantangan utama pengembangan kompetensi profesional guru di era digital mencakup ketidaksetaraan digital, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi perubahan, sehingga merekomendasikan model pengembangan profesional guru yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis inovasi. Judijanto (2024) menemukan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara tingkat literasi digital guru dan kualitas pembelajaran, di mana literasi digital menjelaskan 52% variasi pada kualitas pembelajaran.

Suarlin dkk. (2025) menemukan bahwa guru memberikan respons positif terhadap Platform Merdeka Mengajar di Kabupaten Gowa yang terbukti meningkatkan keterampilan pedagogik, kepercayaan diri mengajar, serta kreativitas penggunaan TIK, namun hambatan signifikan masih muncul berupa keterbatasan jaringan internet dan kesenjangan kompetensi teknologi antarguru. Fristianingsih, Hidayati, dan Zuhaery (2026) menegaskan bahwa kepemimpinan digital kepala sekolah mampu membangun budaya kerja yang adaptif, mendorong kolaborasi dan pembelajaran mandiri guru, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah melalui sistem digital.

No	Dimensi Kesenjangan	Indikator	Dampak terhadap Pembelajaran
1	Kompetensi Teknis	Rendahnya kemampuan penggunaan aplikasi digital (khususnya guru senior)	Pemanfaatan platform digital tidak optimal
2	Kompetensi Pedagogis-Digital (TPACK)	Belum mampu mengintegrasikan teknologi dalam desain pembelajaran	Pembelajaran digital bersifat konvensional berbasis digital
3	Literasi Digital	Variasi literasi digital antarguru yang sangat tinggi	Ketidakmerataan kualitas pembelajaran berbasis teknologi
4	Motivasi & Sikap	Resistensi terhadap perubahan dan kekhawatiran akan otoritas	Adopsi inovasi terhambat meskipun infrastruktur tersedia
5	Dukungan Kelembagaan	Minimnya pendampingan teknis dan komunitas belajar digital	Penggunaan teknologi bersifat sporadis, tidak berkelanjutan

Tabel 3. Dimensi Kesenjangan Kompetensi Digital Pendidik di Sulawesi Selatan

Triyunita dkk. (2025) menegaskan bahwa transformasi digital menuntut guru untuk menguasai teknologi dalam pembelajaran, meningkatkan keterampilan digital, dan beradaptasi dengan metode pengajaran berbasis teknologi pada keempat dimensi kompetensi guru seperti pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian, sehingga mengatasi tantangan ini memerlukan pelatihan berkelanjutan, penguatan literasi digital, dan kebijakan pendidikan yang mendorong pemanfaatan teknologi optimal.

3. Kesenjangan Kebijakan dan Budaya Organisasi

Meskipun kebijakan transformasi digital telah berkembang pesat, kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan masih nyata terasa. Nashrullah dan Rahman (2024) menemukan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sekolah, sektor swasta, dan komunitas. Septio dkk. (2025) menyimpulkan bahwa hambatan utama transformasi digital di Indonesia adalah kesenjangan digital yang tajam dalam hal infrastruktur dan kompetensi, serta hambatan internal seperti resistensi guru terhadap perubahan.

Budaya organisasi yang konvensional, pola kerja manual yang sudah mengakar, serta kurangnya budaya inovasi di sekolah menjadi faktor kultural yang memperlambat adopsi teknologi meskipun perangkat telah tersedia. Triyunita dkk. (2025) menegaskan bahwa mengatasi tantangan ini memerlukan pelatihan berkelanjutan, penguatan literasi digital, dan kebijakan pendidikan yang mendorong pemanfaatan teknologi optimal pada keempat dimensi kompetensi guru: pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian.

C. Tantangan Utama Implementasi Transformasi Digital bagi Pendidik di Sulawesi Selatan

1. Tantangan Infrastruktur dan Konektivitas

Tantangan infrastruktur dan konektivitas merupakan hambatan paling nyata yang dihadapi pendidik di Sulawesi Selatan. Banyak sekolah di pelosok menghadapi keterbatasan infrastruktur fisik maupun digital secara bersamaan, seperti ruang kelas yang sempit, akses

internet yang tidak stabil, serta minimnya perangkat komputer. Kondisi ini semakin diperparah oleh faktor geografis di mana sekolah-sekolah di daerah kepulauan seperti Selayar atau pegunungan seperti Tana Toraja menghadapi tantangan topografis yang mempersulit pembangunan infrastruktur jaringan. Sumual dkk. (2025) menegaskan perlunya penguatan infrastruktur TIK melalui perencanaan strategis, peningkatan kapasitas digital, dan kolaborasi multipihak.

2. Tantangan Kompetensi dan Literasi Digital Guru

Tantangan kompetensi dan literasi digital guru merupakan dimensi yang paling menentukan keberhasilan transformasi digital di tingkat satuan pendidikan. Ramadhan (2026) dalam kajian literatur sistematis tentang supervisi pendidikan digital menemukan bahwa implementasi supervisi berbasis digital menghadapi tantangan mendasar berupa kesenjangan infrastruktur, literasi digital yang bervariasi, serta isu privasi data dan beban kerja administratif yang meningkat. Saputra dan Aji (2025) menegaskan bahwa era digital menuntut pendidik untuk memiliki kompetensi digital, keterampilan pedagogik adaptif, dan pola pikir pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Studi di SMA Negeri 1 Luwu Timur (Siska, 2023) menemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka yang didukung teknologi digital berjalan dengan dukungan perangkat keras seperti komputer, Smart TV, LCD, dan akses internet untuk berbagai kebutuhan pembelajaran, namun sekolah masih terus berupaya memperbaiki penyediaan perangkat keras dan pemerataan akses internet, sementara guru diberikan dukungan melalui berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dan penggunaan aplikasi pembelajaran. Temuan ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan kompetensi digital guru di Sulawesi Selatan sudah berjalan, namun masih terfragmentasi dan belum komprehensif.

Sulispala dkk. (2025) menemukan bahwa meskipun guru memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya teknologi, mereka menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses perangkat digital dan kurangnya pelatihan yang memadai, terutama bagi guru senior. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa integrasi teknologi memiliki potensi besar meningkatkan efektivitas pembelajaran, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan.

3. Tantangan Kepemimpinan Digital dan Dukungan Kelembagaan

Kepemimpinan digital di tingkat satuan pendidikan merupakan faktor penentu yang kerap luput dari perhatian. Antukai dkk. (2025) menemukan bahwa strategi kepemimpinan digital kepala sekolah secara signifikan mempengaruhi kemampuan guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Fristianingsih dkk. (2026) mengonfirmasi bahwa kepemimpinan digital kepala sekolah mampu membangun budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi, mendorong kolaborasi, pembelajaran mandiri, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah. Kajian ini menegaskan bahwa kepemimpinan digital berimplikasi langsung pada penguatan kompetensi profesional dan inovasi pembelajaran.

Studi pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Mardin, (2025) dari Universitas Hasanuddin menemukan bahwa meskipun *Smart School* memiliki sejumlah keunggulan komparatif seperti mudah diintegrasikan dengan sistem pendidikan lokal dan dapat diimplementasikan secara bertahap, efektivitas program ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi di masing-masing sekolah dan kesiapan pendidik untuk beradaptasi dengan model pembelajaran hybrid. Tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan pelatihan guru menjadi faktor yang diakui masih memerlukan perhatian serius dalam keberlangsungan program.

4. Tantangan Budaya Perubahan

Tantangan budaya perubahan merupakan hambatan yang paling dalam karena menyentuh aspek nilai dan kebiasaan profesional yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Septio dkk. (2025) dalam tinjauan literatur sistematisnya mengidentifikasi resistensi guru terhadap perubahan sebagai hambatan internal utama yang bersumber dari ketakutan akan ketidakmampuan mengadaptasi teknologi baru, kekhawatiran kehilangan otoritas, serta kurangnya insentif yang memadai bagi guru untuk berinovasi secara digital.

No	Dimensi Tantangan	Bentuk Hambatan	Strategi Respons	Referensi
1	Infrastruktur	Internet tidak stabil, blank spot, listrik tidak merata	Kolaborasi pemerintah-swasta, TIK berbasis offline	Sumual dkk. (2025)
2	Kompetensi Digital	Kesenjangan kompetensi guru muda vs senior	Pelatihan berkelanjutan & komunitas belajar	Marnoko (2025)
3	Kepemimpinan	Minimnya kepala sekolah yang bervisi digital	Pelatihan kepemimpinan digital kepek	Fristianingsih dkk. (2026)
4	Budaya Organisasi	Resistensi terhadap perubahan, pola kerja konvensional	Manajemen perubahan berbasis komunikasi dan insentif	Septio dkk. (2025)
5	Kebijakan	Diharmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal	Penguatan regulasi daerah yang kontekstual	Nashrullah & Rahman (2024)

Tabel 4. Matriks Tantangan Implementasi Transformasi Digital Pendidik di Sulawesi Selatan

D. Proses Pelaksanaan Transformasi Digital dalam Pengembangan Pendidik di Sulawesi Selatan

1. Peningkatan Kompetensi Digital Pendidik

Proses peningkatan kompetensi digital pendidik di Sulawesi Selatan berjalan melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi, mulai dari pelatihan formal berbasis institusi, program kolaborasi lintas sektor, hingga komunitas belajar mandiri berbasis platform digital. Program *Collaborative Digital Class* memberikan kesempatan bagi 730 pendidik untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan AI, 30 peserta untuk visualisasi data, dan 30 peserta untuk produksi video sepanjang tahun 2025. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sulawesi Selatan menyelenggarakan Bimtek Pengembangan Situs Mandiri Google Site dan Multimedia bagi 240 peserta GTK se-Sulsel sebagai program konkret peningkatan kompetensi digital yang praktis dan terukur.

Marnoko (2025) merekomendasikan model pengembangan profesional guru yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis inovasi, mencakup pelatihan digital berkelanjutan, komunitas belajar kolaboratif, dan integrasi teknologi AI dalam proses pelatihan. Helmawati (2025) mengonfirmasi bahwa Platform Merdeka Mengajar tidak hanya memfasilitasi pengelolaan kinerja guru tetapi juga mendorong paradigma baru yang lebih mandiri, kreatif, dan *data-driven* dalam pengelolaan pembelajaran.

2. Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan menjadi fondasi penentu apakah transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Di Sulawesi Selatan, dukungan kelembagaan diwujudkan melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sekolah, industri, akademisi, komunitas, dan media. Program *Smart School* berkolaborasi dengan ASEAN Foundation, Google.org, dan *Kaizen Collaborative Impact* dalam kegiatan *Hour of Code* yang melibatkan pendidik dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari kampanye literasi digital di 10 negara ASEAN.

Antukai dkk. (2025) menegaskan bahwa kepemimpinan digital yang kuat dari kepala sekolah merupakan prasyarat utama keberhasilan transformasi digital. Hal ini sejalan dengan temuan Fristianingsih dkk. (2026) yang menemukan bahwa kepala sekolah dengan visi digital yang kuat mampu menciptakan ekosistem belajar yang mendorong guru mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi secara bermakna dalam pembelajaran.

3. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Dalam aspek pemanfaatan teknologi secara langsung dalam proses pembelajaran, transformasi digital telah mengubah cara pendidik berinteraksi dengan konten dan peserta didik secara fundamental. Hasmirati (2026) dalam studinya di MTsN 1 Kota Makassar sebagai contoh implementasi transformasi digital manajemen pendidikan menemukan bahwa integrasi *learning management system*, layanan administratif digital, dan manajemen berbasis data secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan fleksibilitas pembelajaran, namun keberhasilan ini mensyaratkan kepemimpinan yang kuat, budaya kelembagaan yang mendukung inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten secara digital. Contoh nyata pemanfaatan teknologi yang inspiratif di Sulawesi Selatan adalah Bimtek Profil Pancasila berbasis digital bagi guru di SD Tana Toraja yang memanfaatkan aplikasi *Sparkol VideoScribe* untuk menciptakan materi pembelajaran berbasis video animasi dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, yang terbukti meningkatkan kemampuan teknologi dan kreativitas guru dalam menyampaikan konten pembelajaran.

E. Implikasi Transformasi Digital dalam Pengembangan Pendidik di Sulawesi Selatan

1. Implikasi terhadap Kompetensi dan Identitas Profesional Pendidik

Transformasi digital membawa implikasi yang sangat luas terhadap kompetensi dan identitas profesional pendidik. Triyunita dkk. (2025) menemukan bahwa transformasi digital berdampak signifikan terhadap keempat kompetensi inti guru, diantaranya :

a. Kompetensi pedagogik

Guru dituntut menguasai teknologi sebagai medium pembelajaran yang mengubah cara merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar.

b. Kompetensi sosial

Guru perlu beradaptasi dengan pola interaksi digital yang berbeda dengan tatap muka konvensional.

c. Kompetensi profesional

Penguasaan pengetahuan konten semakin diperluas dengan kemampuan mengintegrasikan teknologi secara pedagogis (TPACK).

d. Kompetensi kepribadian

Guru memerlukan sikap terbuka terhadap perubahan, ketangguhan menghadapi kegagalan teknologi, dan motivasi untuk terus belajar hal baru.

Saputra dan Aji (2025) menegaskan bahwa era digital menuntut pendidik untuk memiliki

kompetensi digital, keterampilan pedagogik adaptif, dan pola pikir pembelajaran sepanjang hayat, di mana penguatan pelatihan, dukungan kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi esensial untuk menghadapi lanskap profesi guru yang terus berubah di era digital. Implikasi paling mendasar bagi identitas profesional adalah pergeseran peran guru dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator, desainer pengalaman belajar, dan pembimbing pembelajaran mandiri.

2. Implikasi terhadap Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan

Transformasi digital membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola dan akuntabilitas sistem pendidikan di Sulawesi Selatan. Penerapan TTE bagi 518 kepala sekolah bukan sekadar efisiensi administratif semata, melainkan merupakan langkah strategis dalam membangun budaya birokrasi digital yang transparan, akuntabel, dan berorientasi layanan. Pj. Gubernur Sulsel Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa dengan TTE, proses penandatanganan dokumen yang semula memakan empat hari dapat diselesaikan dalam 40 menit, dokumen tidak lagi hilang atau rusak, dan efisiensi anggaran kertas meningkat signifikan.

Manajemen kinerja guru berbasis platform digital melalui PMM/Ruang GTK membawa implikasi besar terhadap akuntabilitas profesional pendidik. Studi implementasi PMM untuk pengelolaan kinerja guru menemukan bahwa platform ini memungkinkan kepala sekolah memantau perkembangan guru secara *real-time*, memberikan umpan balik yang lebih cepat, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, sementara guru merasa terbantu dalam pengembangan profesional melalui fitur pelatihan yang tersedia dalam aplikasi. Transparansi penilaian kinerja yang lebih objektif dan terintegrasi dengan e-Kinerja BKN merupakan implikasi positif yang signifikan dari digitalisasi manajemen pendidik.

3. Implikasi terhadap Ekuitas Pendidikan

Transformasi digital memiliki implikasi ambigu terhadap ekuitas pendidikan di Sulawesi Selatan. Di satu sisi membuka peluang pemerataan akses kualitas pendidikan, namun di sisi lain berpotensi memperlebar kesenjangan jika tidak dikelola dengan tepat. Program *Smart School* terbukti efektif memperluas akses siswa di daerah terpencil terhadap pembelajaran berkualitas yang sebelumnya hanya tersedia di kota besar, melalui model *hybrid* yang menghadirkan 70 guru terbaik Sulsel ke layar *Smart TV* di sekolah-sekolah seluruh provinsi. Sejak pelaksanaannya, peningkatan jumlah lulusan SMA Negeri Sulsel yang masuk perguruan tinggi negeri menjadi salah satu indikator keberhasilan program ini dalam mengurangi kesenjangan akses kualitas pendidikan.

Penelitian tentang disparitas pendidikan perkotaan dan pedesaan di Indonesia menegaskan bahwa kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang memperbesar disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan dampak jangka panjang berupa rendahnya capaian akademik, terhambatnya mobilitas sosial, dan berkurangnya produktivitas tenaga kerja dari daerah tertinggal. Implikasi ini menempatkan transformasi digital bukan hanya sebagai agenda pedagogis semata, tetapi juga sebagai agenda keadilan sosial dan pembangunan manusia yang memerlukan keberpihakan kebijakan dan investasi yang tepat sasaran.

4. Implikasi terhadap Model Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Transformasi digital membuka peluang baru yang sangat besar bagi pengembangan profesional pendidik yang lebih fleksibel, personal, dan berkelanjutan. Komunitas belajar virtual, pelatihan daring asinkron, forum diskusi antar guru lintas daerah, dan platform berbagi praktik baik seperti Ruang GTK merupakan manifestasi konkret dari implikasi transformasi digital dalam pengembangan profesional pendidik. Kajian literatur tentang

pengembangan profesionalisme guru di era digital menemukan bahwa komunitas belajar profesional berbasis digital memungkinkan guru mengakses sumber belajar berkualitas kapan saja dan dari mana saja, sehingga relevan khususnya bagi guru-guru di daerah terpencil Sulawesi Selatan yang selama ini terbatas akses terhadap pengembangan profesional tatap muka.

Marnoko, (2025) merekomendasikan model pengembangan profesional guru yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis inovasi sebagai strategi utama menghadapi era transformasi digital, yang mencakup pelatihan digital berkelanjutan, komunitas belajar kolaboratif, dan integrasi teknologi AI dalam proses pelatihan sebagai elemen-elemen kunci yang saling memperkuat. Implikasi ini menuntut perubahan paradigma dalam cara memandang dan merancang pengembangan pendidik, dari model pelatihan episodik berbasis kehadiran fisik menjadi ekosistem pembelajaran profesional yang terus-menerus, adaptif, dan terintegrasi dengan platform digital yang mudah diakses oleh semua pendidik, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Pengembangan pendidik di Sulawesi Selatan telah didukung oleh ekosistem kebijakan yang relatif komprehensif, mulai dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 di tingkat nasional hingga inovasi spesifik daerah seperti *Smart School*, *Collaborative Digital Class*, Komunitas Belajar *Smart School*, dan digitalisasi tata kelola melalui TTE bagi 518 kepala sekolah. Namun, implementasinya masih menghadapi empat dimensi kesenjangan yang saling berinteraksi, yakni kesenjangan infrastruktur dengan penetrasi internet Sulawesi hanya 68,35% terendah di Indonesia dan disparitas antara Makassar 79,66% dan Tana Toraja 46,72%, kesenjangan kompetensi digital antara guru muda yang adaptif dan guru senior yang kesulitan mengadaptasi teknologi, kesenjangan kebijakan antara wilayah berteknologi memadai dan wilayah terpencil serta kesenjangan budaya organisasi antara sekolah inovatif dan sekolah konvensional. Tantangan utama bersifat struktural, diantaranya infrastruktur dan konektivitas di daerah 3T, literasi digital pendidik yang belum merata, dan resistensi budaya terhadap perubahan.

Oleh karena itu, direkomendasikan beberapa hal, yakni penguatan ekosistem kebijakan terpadu dengan harmonisasi kebijakan pusat-daerah dan penyesuaian terhadap kondisi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga daerah 3T sebagai prasyarat fundamental, pengembangan kompetensi digital pendidik yang berkelanjutan, terdiferensiasi, dan kontekstual, kemudian penguatan budaya inovasi di satuan pendidikan melalui kepemimpinan digital kepala sekolah yang visioner dan pengembangan model pemantauan dan evaluasi transformasi digital yang berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran di Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Antukai, V., Zulystiawati, Ansar, & Mas, S. R. (2025). Sustainable education transformation in Eastern Indonesia: The role, challenges, and strategies of digital leadership in developing teachers' digital competencies. *International Journal of Social Science and Human Research (IJSSHR)*, 8(12), 9871–9876. <https://ijsshr.in>
- Fristianingsih, Hidayati, D., & Zuhaery, M. (2026). Transformasi kepemimpinan digital kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (JERKIN)*, 4(4), 22628–

22636. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.3992>

- Helmawati, H., Dermawan, H., Nurwulan, T. R., & Susanti. (2025). Perubahan paradigma guru dalam pengelolaan kinerja di Platform Merdeka Mengajar. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 9(3). <https://doi.org/10.30998/sap.v9i3.26772>
- Handayani Mardin, N. F. R., Haning, M. T., & Syahribulan. (2024). Exploring the effectiveness of smart school program as a policy innovation in South Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Educational Technology and Innovation*, 8(6), 7570–7577. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.3639>
- Hasmirati. (2026). Digital transformation in educational management: Strategies for innovation and enhancing school quality. *Journal of Natural and University Sciences (JoNUNS)*, 53(1). <https://jonuns.com>
- Judijanto, L. (2024). Analisis pengaruh tingkat literasi digital guru dan siswa terhadap kualitas pembelajaran di era digital di Indonesia. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran (SPP)*, 2(2), 50–60. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i02.391>
- Marnoko. (2025). Strategies for developing teacher professional competence in the era of digital transformation in education: A literature review. *Indonesian Journal of Education (IJE)*, 4(4), 105–111. <https://ije.com>
- Mardin, N. F. R. H. (2025). *Pelaksanaan program Smart School di Provinsi Sulawesi Selatan*. Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar. <https://repository.unhas.ac.id>
- Nashrullah, M., & Rahman, S. (2024). Transformasi digital dalam pendidikan Indonesia: Analisis kebijakan dan implikasinya terhadap kualitas pembelajaran. *MUDIR: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1290>
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Diskominfo SP dan Disdik rancang penerbitan TTE ratusan kepala sekolah SMA di Sulsel*. sulselprov.go.id. <https://sulselprov.go.id>
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). *Dukung transformasi digital, Sulsel luncurkan Collaborative Digital Class*. sulselprov.go.id. <https://sulselprov.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Digitalisasi Pembelajaran*. JDIH PU. <https://jdih.pu.go.id>
- Ramadhan, R. (2026). Transformasi supervisi pendidikan berbasis digital dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. *Pedagogy: Jurnal Pendidikan*, 11(1). <https://ejournal./pedagogy>
- Ro'fah, F., Gunansyah, G., & Puspita, A. M. I. (2024). Peran Platform Merdeka Mengajar (PMM) dalam mendukung kesiapan guru untuk implementasi Kurikulum Merdeka: Tinjauan literature review. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i1.2025.1>
- Saputra, P. A., & Aji, S. B. (2025). Tantangan dan strategi pengembangan profesi pendidik di era digital. *SHEs: Conference Series*, 8(3), 1552–1561. <https://doi.org/10.20961/shes.v8i3.107413>
- Septio, G., et al. (2025). Integrasi transformasi digital dalam kurikulum dan pembelajaran sekolah di Indonesia: Sebuah tinjauan sistematis. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 7(1), 218–231. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6731>
- Siska. (2023). *Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Luwu Timur*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id>
- Suarlin, Sukawati, H., Arhas, S. H., & MY, N. (2025). Respon guru terhadap Platform

Merdeka Mengajar dalam digitalisasi pendidikan di Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (JERKIN)*, 3(4), 3306–3315. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.928>

Sulisपाल, N. S., Hul Jannah, M., Putra, M. J. A., & Sari, M. Y. (2025). Peran guru dalam mengintegrasikan teknologi pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan (JPDK)*, 10(1), 22–31. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v10i1.3210>

Sumual, S. D. M., Sambur, J. R., & Tamtompol, M. M. (2025). Analisis infrastruktur TIK dalam mendukung transformasi digital di satuan pendidikan. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(6), 2463–2472. <https://doi.org/10.53682/edutik.v5i6.234>

Triyunita, H., Yana, N., Bachtiar, M. H., & Abdurrahmansyah. (2025). Transformasi digital terhadap kompetensi guru dalam pendidikan. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4364–4368. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.771>

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA